

niaga kerja Indonesia yang i kapal berbendera asing. Beberapa tahun terakhir, rban jatuh bukan karena ketau sakit, tapi diduga karena n. Untuk itu, kami meminta khusus dari US Department kata Nilanto.

bangsa Indonesia, yakni memastikan cadangan stok beras mencukupi, ketersediaan beras terjamin, serta harga terjangkau," ungkap dia di Jakarta, kemarin.

Di sisi lain, untuk mengintervensi tata niaga guna mengamankan gabah petani pada saat harga jatuh, termasuk

Kemudian, melanjutkan Tim Serap Gabah Petani bekerja sama dengan mengoptimalkan 50 ribu orang penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan Babinsa TNI. "Selain itu, memperluas kemitraan dengan swasta dan kelompok tani, atau gabungan kelompok tani yang memiliki penggilingan, dryer (sarana pengering), juga gudang. Menginventarisasi daerah-daerah yang akan panen secara simultan, melalui pencatatan dan bukti visual melalui aplikasi *open camera* atau lainnya," kata Amran.

Untuk mencapai target, ujar dia,

Selatan (Sumsel), Lampung, Bante Jawa Barat (Jabar), Jawa Tengah (J teng), Jawa Timur (Jatim), Nu Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi Selatan (Sulsel), dengan penyerap: sebesar 3,2 juta ton GKG.

Amran mengatakan, rancangan s saran Sergap pada periode 26-31 Mar 2017 dan April 2017 adalah Sums sebanyak 164.625 ton GKG, Lampung 302.622 ton GKG, Banten 138.724 t GKG, Jabar 600.133 ton GKG, Jater 484.732 ton GKG, Jatim 776.701 t GKG, NTB 336.398 ton GKG, da Sumsel 396.064 ton GKG. (eme)

## 300 Ribu Ha Hutan untuk Reforma Agraria

RA - Kementerian Lingdup dan Kehutanan (LHK) akan melepaskan kawasan luas 300 ribu hektare (ha) dukungan penyediaan Tanah Reforma Agraria (TORA) tahun pelepasan kawasan hutan RA pada 2018 diharapkan meningkat dengan akan nya Perpres tentang Tata asan Kawasan Hutan.

Pengukuhan dan Penatawawasan Kementerian LHK ad Said mengungkapkan, lepasan kawasan hutan RA pada 2017 adalah 300 hingga jika dihitung secara 2017 nantinya sudah 1 juta ha. "Untuk verifikasi hutan masih menunggu tata Cara Pelepasan Katan supaya mempercepat lepasan," ujar Said usai ntang Reforma Agraria tanan Sosial yang digelar Komunikasi dan Inforakarta, kemarin.

atau contoh percepatan kawasan hutan yang bisa dengan adanya Perpres

ini misalkan kawasan transmigrasi yang dulunya diajukan pelepasannya oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Desa PDPT) ke Kementerian LHK dulu untuk diproses maka nantinya akan ditangani tim khusus di mana semua pihak yang berkepentingan akan turun langsung memverifikasi bersama sehingga keputusan pelepasan dapat dilakukan saat itu juga.

Tim di tingkat pusat, menurut dia seperti dilansir *Antara*, akan langsung berada di bawah Menko Perekonomian, tim pelaksana ada di jajaran Eselon I Kementerian/Lembaga terkait, serta tim di lapangan ada di daerah akan dibentuk oleh gubernur yang terdiri dari dinas-dinas terkait. (tl)

## Manulife Asset Management

### PENGUMUMAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA MANULIFE

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia, berkedudukan di Jakarta selaku Manajer Investasi:

1. Reksa Dana Manulife Dana Tetap Pemerintah
2. Reksa Dana Manulife Saham Andalan
3. Reksa Dana Manulife Dana Tumbuh Berimbang
4. Reksa Dana Manulife Dana Stabil Berimbang
5. Reksa Dana Manulife Indonesia Money Market Fund
6. Reksa Dana Manulife Syariah Sektorial Amanah
7. Reksa Dana Manulife Dana Tetap Utama
8. Reksa Dana Manulife USD Fixed Income (untuk selanjutnya disebut sebagai "Reksa Dana Manulife")

dengan ini mengumumkan telah dilaksanakannya perubahan Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana Manulife sehubungan dengan penggantian Bank Kustodian, yaitu semula The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta menjadi PT Bank HSBC Indonesia, efektif per tanggal 17 April 2017.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Manulife serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Jakarta, 29 Maret 2017

Manajer Investasi  
PT Manulife Aset Manajemen Indonesia

## LinkNet

### PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT LINK NET Tbk ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diadakan pada:

Hari / Tanggal : Jum'at, 21 April 2017  
Tempat : Ruang Ballroom B, Hotel Aryaduta Tugu Tani  
Jl. Prapatan 44-48, Jakarta 10110  
Waktu : Pukul 09.30 WIB sampai dengan selesai

Dengan Agenda sebagai berikut:

#### Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST")

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan Pengesahan atas Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2017 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya; dan
4. Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta penentuan honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

#### Catatan:

1. Pengumuman penyelenggaraan Rapat telah dimumkan oleh Perseroan pada surat kabar harian Investor Daily yang terbit pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2017.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebagai berikut:
  - a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif: Pemegang Saham (atau kuasanya yang sah) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2017 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB pada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Sharestar Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di BeritaSatu Plaza Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950; dan
  - b. untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif: Pemegang Saham (atau kuasanya yang sah) yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Rekening pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Bank Kustodian atau Perusahaan Efek, pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2017 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, diwajibkan untuk mendaftarkan diri melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
4. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat dimohon dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas Biro Administrasi Efek Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif, wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dan memperlihatkannya kepada petugas Biro Administrasi Efek Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun, wajib menyerahkan kepada petugas Biro Administrasi Efek Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat, fotokopi: (i) akta pendirian dan pengesahannya; (ii) akta Anggaran Dasar terakhir termasuk persetujuan dari dan/atau surat pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan (iii) akta terkait susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir.
6. a. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan membawa surat kuasa asli yang sah dengan isi dan bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya.  
b. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.  
c. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Kantor Perseroan, dengan alamat Gedung BeritaSatu Plaza Lantai 5, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 35-36, Jakarta Selatan 12950.  
d. Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 6.c di atas kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan pukul 17.30 WIB.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 29 Maret 2017

PT Link Net Tbk  
Direksi